

RINGKASAN

Ade Meutia Ananda **Implikasi Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Dan Sertifikat Standar Di Kota Lhokseumawe**
NIM 210510298 **(Sofyan Jafar, S.H., M.H dan Arif Rahman, S.H., M.H)**

Perizinan untuk pelaku usaha bertujuan untuk adanya sebuah kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kewajiban bagi UMKM dalam mendapatkan perizinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga implikasi hukum yang diberikan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Namun dalam hal ini di Kota Lhokseumawe UMKM yang tidak memiliki perizinan usaha berupa NIB dan sertifikat standar belum secara menyeluruh dan tegas mendapatkan implikasi hukum atau dampak dari Dinas terkait

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap UMKM yang tidak memiliki NIB dan sertifikat standar di Kota Lhokseumawe, faktor hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendaftarkan usahanya di DPMPTSP Kota Lhokseumawe dan upaya DPMPTSP Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara terarah, metode pengambilan sampel melalui teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*) dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implikasi hukum terhadap UMKM yang tidak memiliki legalitas usaha yaitu dengan diberikannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif hingga penutupan sementara dan usaha tersebut juga kesulitan dalam mengakses layanan pemerintah serta tidak mendapatkan perlindungan hukum. Adapun faktor yang menjadi penghambat pelaku usaha dalam mendaftar yaitu karena minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap perizinan, kurangnya kesadaran hukum dan sistem perizinan OSS yang dilakukan secara online juga membuat sebagian pelaku usaha yang gagap teknologi (gaptek) kesulitan dalam mengurus perizinan. Upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Lhokseumawe berupa sosialisasi, pendampingan, pengarahan dan pengawasan bagi setiap pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe.

Disarankan kepada pemerintah terkhusus Kota Lhokseumawe agar lebih tegas terkait dengan dampak hukum yang akan diberikan kepada UMKM yang tidak mempunyai legalitas. Kepada pelaku usaha juga harus lebih peka terhadap regulasi hukum yang berlaku dan berusaha mencari tahu sebelum memulai suatu usaha agar usahanya juga dapat berkembang baik dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Serta kepada pihak DPMPTSP untuk lebih merata dan menyeluruh pada saat melakukan sosialisasi, pendampingan, pengarahan kepada UMKM serta pengawasan yang dilakukan harus lebih dipertegas kembali.

Kata Kunci: *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, Implikasi Hukum, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.*

SUMMARY

Ade Meutia Ananda
NIM 210510298

Legal Implications for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) That Do Not Have a Business Identification Number (NIB) and Standard Certificate in Lhokseumawe City
(Sofyan Jafar, S.H., M.H and Arif Rahman, S.H., M.H)

Licensing for business actors aims to have legal certainty, protection of the public interest, and the realization of community welfare. The obligation for UMKM to obtain permits is regulated in Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing so that the legal implications provided are also in accordance with Government Regulations. However, in this case, in Lhokseumawe City, UMKM that do not have business licenses in the form of NIB and standard certificates have not thoroughly and firmly received legal implications or impacts from the relevant agencies

This study aims to find out the legal implications for UMKM that do not have NIB and standard certificates in Lhokseumawe City, the obstacles faced by UMKM actors in registering their businesses at the Lhokseumawe City DPMPTSP and the efforts of the Lhokseumawe City DPMPTSP in increasing the awareness of UMKM actors to register their businesses.

This study uses an empirical juridical research method with a sociological juridical approach. Data was obtained through directed interviews, sampling methods through sample determination techniques with certain considerations (*purposive sampling*) and qualitatively analyzed.

The results of this study explain that the legal implications for UMKM that do not have business legality are the provision of administrative sanctions in the form of written warnings, administrative fines to temporary closure and the business also has difficulty in accessing government services and does not get legal protection. The factors that hinder business actors in registering are due to the lack of knowledge of business actors about licensing, lack of legal awareness and the OSS licensing system that is carried out online also makes it difficult for some business actors who stutter technology in taking care of licensing. The efforts made by the Lhokseumawe City DPMPTSP are in the form of socialization, mentoring, briefing and supervision for every UMKM actor in Lhokseumawe City.

It is recommended to the government, especially Lhokseumawe City, to be more strict regarding the legal impact that will be given to UMKM that do not have legality. Business actors must also be more sensitive to the applicable legal regulations and try to find out before starting a business so that their business can also develop both with certainty and legal protection. As well as to the DPMPTSP to be more evenly and comprehensively when conducting socialization, mentoring, briefing to UMKM and the supervision carried out must be further emphasized.

Keywords: *Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM), Business Identification Number (NIB), Standard Certificates, Legal Implications, One-Stop Integrated Service Investment Office.*